



BIRO ORGANISASI PROVINSI LAMPUNG

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2024 Biro Organisasi Lampung menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan, 1 (satu) indikator tujuan, 1 (satu) sasaran dan 3 (tiga) IKU sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Selanjutnya Sasaran Strategis tersebut diwujudkan dalam 2 (dua) Program dan 5 (lima) Kegiatan dan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD Tahun 2024. Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan rata-rata mencapai 100%. Dengan demikian tugas yang diamanatkan di dalam Rencana Strategis dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga secara keseluruhan tercapainya target-target pembangunan tadi menggambarkan adanya komitmen yang kuat dari unsur pimpinan maupun staf Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya dan langkah-langkah yang dirumuskan sebagai strategi pemecahan masalah yang selama ini ditemui. Tentunya upaya-upaya tersebut akan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kemampuan sumber daya yang dimiliki guna pencapaian kinerja yang lebih tinggi ditahun berikutnya guna mewujudkan visi Gubernur Lampung “*Rakyat Lampung Berjaya*”.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kegiatan yang didukung dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat diselesaikan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana dituangkan dalam laporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Adapun laporan dimaksud adalah **“LAPORAN KINERJA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024”** yang berupa pertanggungjawaban unit kerja terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.

Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 ini dimaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kerja untuk terwujudnya aparatur yang bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 ini disusun dan mudah-mudahan dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan kinerja Instansi Pemerintah dan Aparatur Daerah dimasa mendatang.

Bandar Lampung, Agustus 2025

KEPALA BIRO ORGANISASI,

Drs. HERY SADLI, M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690719 199003 1 005



DAFTAR ISI

COVER	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum	2
1.3 Isu Strategis	9
1.4 Landasan Hukum	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. Perubahan Rencana Strategis 2019-2024	14
2.1.1. Visi dan Misi	14
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator	16
2.2. Perubahan Renja 2024	23
2.3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
2.4. Keselarasan Dokumen SAKIP Tahun 2024	25
2.5. Program Unggulan	26
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Pengukuran Kinerja	28
3.2. Capaian Indikator Tujuan dan Kinerja Utama Tahun 2019 -2024	30
3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	32



3.4. Akuntabilitas Keuangan	63
3.5. Efektifitas Kinerja dan Efisiensi Anggaran	67
3.6. Refokusing Anggaran	71
3.7. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Internal Tahun 2024	72
3.8. Inovasi dan Prestasi	74
BAB IV. PENUTUP	81
4.1. Kesimpulan	81
4.2. Rekomendasi	81



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Lampung.....	18
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.....	19
Tabel 2.3	Perubahan Renja Tahun 2024.....	23
Tabel 2.4	Perubahan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Lampung Tahun 2024	25
Tabel 2.5	Keselaran Dokumen SAKIP Tahun 2024.....	26
Tabel 2.6	Program Unggulan.....	27
Tabel 3.1	Kategori Capian Indikator Kinerja	29
Tabel 3.2	Presentase dan Penilaian Realisasi Kinerja Tahun 2019-2024.....	31
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Renstra 2019-2024.....	33
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Utama 1 Tahun 2019 -2024	34
Tabel 3.5	Perbandingan Target Capaian Indikator Kinerja Utama 1 Tahun 2024 secara Nasional	35
Tabel 3.6	Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi Indikator Kinerja Utama 1 Tahun 2024	36
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Indeks RB pada RPJMDP 2019-2024	42
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Indeks Core Values ASN BerAKHLAK Tahun 2022-2024	44
Tabel 3.9	Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2019-2021 (PermenPAN RB No. 12/2015)	49



Tabel 3.10	Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022-2023 (PermenPAN RB No. 88/2021)	49
Tabel 3.11	Target dan Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2019-2024	50
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja Utama 2 Tahun 2019-2024	51
Tabel 3.13	Perbandingan Target Capaian Indikator Kinerja Utama 2 Tahun 2024 Secara Nasional	52
Tabel 3.14	Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi Indikator Kinerja Utama 2 Tahun 2024	53
Tabel 3.15	Capaian Indikator Kinerja Utama 3 Tahun 2019-2024	56
Tabel 3.16	Perbandingan Target Capaian Indikator Kinerja Utama 3 Tahun 2024 Secara Nasional	57
Tabel 3.17	Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi Indikator Kinerja Utama 3 Tahun 2024	60
Tabel 3.18	Pagu, Realisasi dan Capaian Anggaran Tahun 2024	64
Tabel 3.19	Rincian Anggaran Biro Organisasi Tahun 2024	64
Tabel 3.20	Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Tahun 2024	67
Tabel 3.21	Persandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Tahun 2024 dirindi menurut Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	68
Tabel 3.22	Refokusing Anggaran Tahun 2024	71
Tabel 3.23	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024	72
Tabel 3.24	Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Komposisi Sumber Daya Manusia pada Biro Organisasi .	3
Gambar 1.2	Struktur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	4
Gambar 3.1	Grafik Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2024	24
Gambar 3.2	Grafik Capaian Indeks ASN BerAKHKLAK Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022-2024	45
Gambar 3.3	Grafik Nilai SAKIP Tahun 2019-2024	50
Gambar 3.4	Grafik Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.....	58
Gambar 3.5	Grafik Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022-2024	59
Gambar 3.6	Aplikasi eSAKIP Provinsi Lampung	75
Gambar 3.7	Aplikasi Si-Manja Provinsi Lampung	76
Gambar 3.8	Aplikasi Sisma SIGER Provinsi Lampung.....	77

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Provinsi Lampung. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini berisi LKj Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan adanya perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Penyampaian Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai perwujudan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian

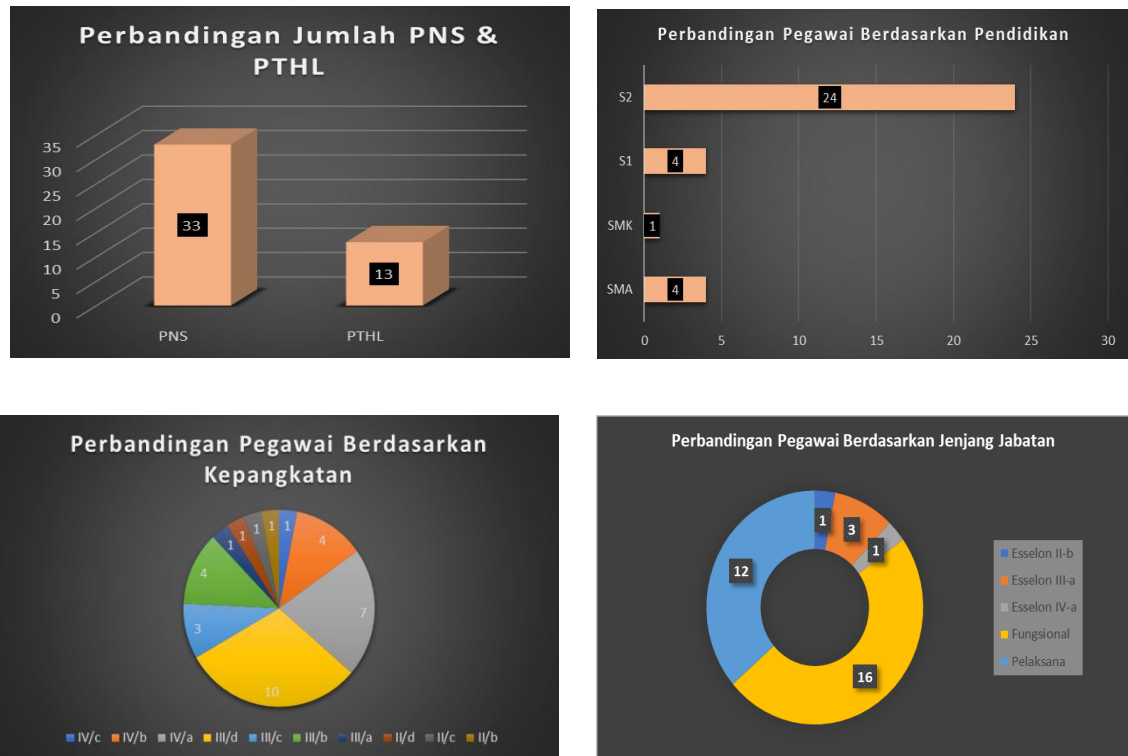
sasaran strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024. Hal ini diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2019-2024 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan juga Penetapan Kinerja Tahun 2024 serta dalam rangka pencapaian misi dan visi dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu kegiatan kinerja setiap unit kerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholder demi perbaikan kinerja ke depan.

1.2 Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang Kelambagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Tatalaksana.

Dalam rangka menjalankan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan, sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting. Sumber daya manusia pada Biro Organisasi mempunyai kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi organisasi, mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean goverment* serta mewujudkan nilai-nilai dari *Core Values BerAKHLAK*. Berdasarkan hasil survei implementasi Core Values BerAKHLAK pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan predikat B (cukup sehat) dengan skor 74,1%.

Gambar 1.1
Komposisi Sumber Daya Manusia pada Biro Organisasi



Sumber : Data Urut Kepangkatan (Simpedu) dan Absensi Biro Organisasi Ta. 2024

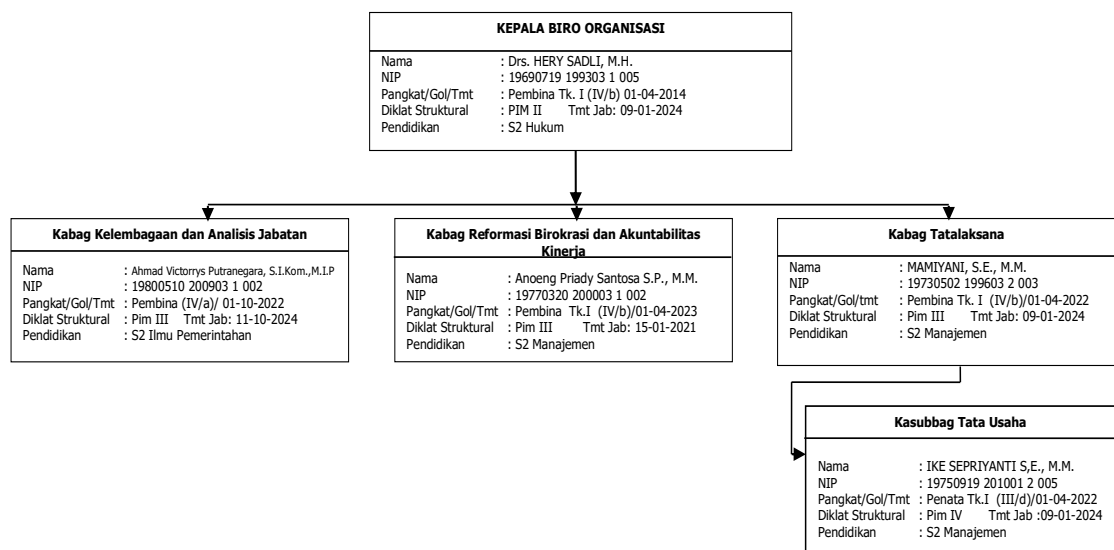
Berdasarkan data Simpedu Biro Organisasi tahun 2024 menunjukkan Jumlah Keseluruhan Pegawai Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung sebanyak 46 (empat puluh enam) orang, terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) orang Pegawai Negeri sipil dan 13 (tiga belas) orang Pegawai Tenaga Harian Lepas. Kualifikasi Pendidikan untuk Pasca Sarjana (S2) sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, Sarjana (S1) sebanyak 4 (empat) orang, Sekolah Menengah Atas sebanyak 5 (lima) orang.

Pangkat dan Golongan untuk IV/c sebanyak 1 (satu) orang, IV/b sebanyak 4 (empat) orang, Golongan IV/a sebanyak 7 (tujuh) orang, Golongan III/d sebanyak 10 (sepuluh) orang, Golongan III/c sebanyak 3 (tiga) orang, Golongan III/b sebanyak 4 (empat) orang, Golongan III/a sebanyak 1

(empat) orang, Golongan II/d sebanyak 1 (satu) orang, dan Golongan II/b sebanyak 2 (dua) orang.

Jumlah Pejabat Eselon II-b sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Eselon III-a sebanyak 3 (tiga) orang, Pejabat Eselon IV-a 1 (Satu) orang, Pejabat Fungsional Tertentu 16 (enam belas) orang dan Pelaksana sebanyak 12 (dua belas) orang.

Gambar 1.2
Struktur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung



Berdasarkan Struktur Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung terdapat 5 (lima) jabatan struktural sebagai berikut:

- Satu orang Kepala Biro, eselon II.b;
- Tiga orang Kepala Bagian, eselon III.a
- Satu orang Kepala Subbagian Tata Usaha, eselon IV.a

Struktur Biro Organisasi berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, terdiri dari:

- Kepala Biro Organisasi
- Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahi :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, membawahi :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bagian Tatalaksana, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang Kelambagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Tatalaksana. Biro Organisasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

1. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, dan perencanaan dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana diatas, Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota, dan analisis jabatan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota, dan analisis jabatan;;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota, dan analisis jabatan;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota, dan analisis jabatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro Organisasi.

2. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian

pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, budaya kerja, dan perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, budaya kerja, dan perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah;
- c. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, budaya kerja, dan perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, budaya kerja, dan perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro Organisasi.

1. Bagian Tatalaksana

Bagian Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Tatalaksana, mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik;

- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Tatalaksana sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro Organisasi.

(1) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, administrasi umum, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendokumentasian, perencanaan pemeliharaan perlengkapan, perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, melaksanakan pembinaan Pegawai ASN. Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d. Melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;

- e. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- f. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;
- g. Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- h. Melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
- i. Melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. Melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tatalaksana.

1.3 Isu Strategis

Kemampuan mengidentifikasi dan mengeksplorasi isu-isu strategis dalam pemerintahan daerah, akan mengantarkan pada sebuah racikan strategi yang jitu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat sebagai domain utama pemerintah. Hal ini merupakan prasyarat di dalam menjalankan konsep strategic management yang lebih mengedepankan kemampuan menganalisis faktor-faktor internal maupun eksternal organisasi, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan kebijakan strategis yang tepat sasaran. Isu-isu strategis Biro Organisasi terdiri dari :

- 1. Melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang mantap dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah;
- 2. Melakukan monitoring, evaluasi dan meningkatkan peran dan fungsi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan

karakteristik dan kemampuan daerah pada Pemerintah Provinsi dan memfasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota se Provinsi Lampung;

3. Meningkatkan tata kerja dan prosedur kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
4. Meningkatkan dan memelihara kualitas sarana kerja dan produktifitas kerja Perangkat Daerah;
5. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ketatalaksanaan pada Perangkat Daerah;
6. Meningkatkan dan mengembangkan analisis dan formasi jabatan Perangkat Daerah;
7. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan profesional aparatur pemerintah daerah dalam rangka tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi;
8. Mengembangkan budaya kerja aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
9. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis dan formasi jabatan serta pendayagunaan kinerja aparatur pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
10. Implementasi SAKIP di Provinsi Lampung belum maksimal karena dokumen RPJMD dan Renstra belum selaras.

1.4 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PEMERINTAH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Isu Strategis, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perubahan Renstra 2019-2024, Perubahan Renja 2024, Perubahan PK 2024, Keselarasan Dokumen SAKIP dan Program Unggulan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Pengukuran Kinerja, Capaian Indikator Tujuan dan Kinerja Utama Tahun 2019-2024, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategi, Akuntabilitas



Keuangan, Efisiensi dan Efektivitas, Refokusing Anggaran, Tindak Lanjut LHE 2024, Prestasi dan Inovasi.

BAB IV PENUTUP

Meliputi Simpulan dari Capaian Kinerja berdasarkan Kriteria Pengukuran, Pagu, Realisasi Keuangan dan Refokusing, Efisiensi dan Efektivitas, serta Rekomendasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perubahan Rencana Strategis 2019-2024

Dalam rangka menyelaraskan visi dan misi daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024, maka disusun juga Perubahan Renstra Biro Organisasi Lampung.

Penyusunan Perubahan Renstra Biro Organisasi Lampung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Perubahan RPJMD Lampung Tahun 2019-2024 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Perubahan Perubahan Renstra Biro Organisasi Lampung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Biro Organisasi Lampung dan stakeholder.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Biro Organisasi Lampung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Lampung yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Biro Organisasi Lampung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Gubernur, pimpinan dan seluruh staf Biro Organisasi Lampung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Lampung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Lampung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Visi Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu :



Sedangkan untuk mewujudkan Visi Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
|  | MISI 1
Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai |
|  | MISI 2
Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik. |
|  | MISI 3
Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas |
|  | MISI 4
Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah |
|  | MISI 5
Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan |
|  | MISI 6
Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama. |

Dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Provinsi Lampung pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan Biro Organisasi termasuk dalam Misi ke-2 yaitu Mewujudkan “*Good Governance*” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik. Yang bertujuan jangka menengah Meningkatkan Peran Kebijakan Daerah untuk mewujudkan efektivitas Tata Kelola Pemerintahan. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung berupa Program Pembangunan sebagai berikut:

- a. Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b. Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
- c. Tatalaksana.

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Gubernur Provinsi Lampung serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Adapun dalam hal ini kaitan tujuan yang ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Gubernur Provinsi Lampung yang telah ditetapkan berdasarkan pada isu-isu strategis. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Adapun **Tujuan** Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang relevan untuk Misi Provinsi Lampung yaitu Misi 2 “Mewujudkan “*Good Governance*” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik” yaitu **Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, Kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran serta Ketatalaksanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan Biro Organisasi Tahun 2019-2024 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuantitatif. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun yang menjadi **Sasaran** Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung berdasarkan misi dan visi gubernur adalah **“Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran serta Tatalaksanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota”**.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Biro Organisasi Lampung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Biro Organisasi Setda
Provinsi Lampung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET (2024)	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
						2019 (kondisi awal)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi General	Skor Reformasi Birokrasi General	79	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran serta ketatalaksanaan provinsi dan kab/kota	Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Tatalaksana)	70	75	80	85	90	100
					Nilai SAKIP pada komponen Pelaporan Kinerja	-	-	-	-	-	11,00
					Indeks Kepuasan Masyarakat	-	80,135	82	84	86	88

Sumber : Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2019 - 2024

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/28/VI.01/HK/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

**Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja
Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024**

NO	TUJUAN			SASARAN STRATEGIS									SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Definisi Operasional	Base Line 2019	Target						
								2020	2021	2022	2023	2024		
1	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, Kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran serta Ketatalaksanaan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Presentase Perangkat Daerah yang menginput LKE unit PMPRB Provinsi Lampung	100	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Pembentukan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi dan Ukuran Serta Tatalaksana Provinsi dan Kab/Kota	Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana)	<u>Makna Indikator</u> -Nilai kematangan organisasi daerah adalah penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan suatu organisasi dalam melakukan perubahan dan perbaikan berkelanjutan. <u>Alasan pemilihan</u> -untuk mengetahui tingkat kematangan organisasi daerah yang menjadi pendorong pertumbuhan,	70	75	80	85	90	100	- Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan; - Dokumen Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja; - Dokumen Tatalaksana.	- PD yang memenuhi dokumen Tata Kelola Organisasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.



					pengembangan, dan perbaikan berkelanjutan dalam berbagai aspek sehingga, tercipta peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, kualitas manajemen organisasi, akuntabilitas dan transparansi <u>Formulasi Perhitungan</u> - Nilai kematangan organisasi bagi pemerintah daerah diukur dengan menggabungkan nilai seluruh perangkat daerah pada daerah yang bersangkutan, kemudian dibagi dengan jumlah perangkat daerah. <u>Makna Indikator</u> -Nilai SAKIP adalah hasil Penilaian atas Kinerja Instansi Pemerintah dalam	-	-	-	-	-	11,00	-	Permenpan RB No.88 Tahun 2021 tentang	- PD yang memenuhi faktor pemenuhan
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	-------	---	---------------------------------------	-------------------------------------



					menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja. SAKIP merupakan integrasi dari Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja. Nilai SAKIP pada Komponen Pelaporan Kinerja meliputi Pemenuhan Laporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja <u>Alasan pemilihan</u> -Untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <u>Formulasi Perhitungan</u> - 15% dari total hasil evaluasi SAKIP <u>Makna Indikator</u> -Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang								Evaluasi kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	pelaporan kinerja
					Indeks Kepuasan Masyarakat	-	80,135	82	84	86	88	- Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang	- PD / Unit Pelayanan Publik Yang Melaksanakan SKM	



					diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. <u>Alasan pemilihan</u> -Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. <u>Formulasi Perhitungan</u> -Jumlah NRR tertimbang / unsur dikali 25 (Kalau pilihan jawabannya 4)						Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik -Surat Edaran Menpan RB No. 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Dilingkungan Instansi Pemerintah	
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--

Sumber : SK IKU Biro Organisasi 2019-2024, Oktober 2024

2.2 Perubahan Renja 2024

Perubahan Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan antara tahapan perencanaan dan penganggaran pada tahun berjalan.

Tabel 2.3 Perubahan Renja Tahun 2024

IKU	Realisasi	Renja 2024		Perubahan Renja 2024	
	2023(%)	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja
- Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana)	99,50%	2.516.381.000	100%	1.746.226.500	100%
- Nilai SAKIP pada komponen Pelaporan Kinerja	-	265.796.000	11,00 (Nilai)	121.346.000	11,00 (Nilai)
- Indeks Kepuasan Masyarakat	86,51 (Nilai)	217.823.000	88 (Nilai)	132.427.500	88 (Nilai)

Sumber: Olahan Data Biro Organisasi, Februari 2025

Pada Tahun Anggaran 2024 Biro Organisasi Setdaprov. Lampung melaksanakan 2 (dua) Program 5 (lima) Kegiatan dengan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran murni sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) pada APBD yang mengalami perubahan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yang disahkan pada APBD-P Tahun Anggaran 2024.

2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Biro Organisasi Lampung Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Biro Organisasi Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Tahun 2024, Sejalan dengan arahan dari Kementerian PANRB dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP pada Provinsi Lampung, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dengan menambahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai SAKIP pada pelaporan kinerja sebagai Indikator Kinerja Utama perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Provinsi
Lampung Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran serta Tatalaksana Provinsi dan Kabupaten/Kota	- Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana) - Nilai SAKIP pada komponen Pelaporan Kinerja - Indeks Kepuasan Masyarakat	100% 11 (nilai) 88 (nilai)

Sumber : Perubahan PK Biro Organisasi, Februari 2025

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.291.126.000,00	APBD-P
Program Penataan Organisasi	Rp. 708.874.000,00	APBD-P
Total Anggaran	Rp. 2.000.000.000,00	APBD-P

2.4 Keselarasan Dokumen SAKIP Tahun 2024

Dokumen perencanaan yang disusun dengan baik harus memiliki keselarasan antara berbagai elemen yang ada, mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya keselarasan yang jelas antara dokumen perencanaan, Biro Organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, meminimalisir risiko dan memaksimalkan pelaksanaan setiap program. Berdasarkan dokumen perencanaan yang telah dibuat pada Biro

Organisasi yang bersumber dari dokumen Perubahan Renstra, Perubahan Rencana Kerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja yang ditampilkan pada tabel di bawah ini maka dapat disimpulkan bahwa terdapat keselarasan pada dokumen perencanaan yang telah disusun.

Tabel 2.5
Keselarasan Dokumen SAKIP Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2023	Perubahan Renstra 2019-2024	Perubahan Renja 2024	Perubahan PK 2024	Ket.
1.	Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana)	90%	100%	100%	100%	Sesuai
2.	Nilai SAKIP pada komponen Pelaporan Kinerja	-	11,00 (Nilai)	11	11	Perubahan Indikator
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,03 (Nilai)	88 (Nilai)	88	88	Sesuai

Sumber: Olahan Data Biro Organisasi, Februari 2025

Sesuai dengan rekomendasi Kementerian PANRB terkait dengan penguatan implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung diperlukan indikator kinerja yang mengukur komponen evaluasi SAKIP pada perangkat daerah sehingga pada tahun 2024 melalui perubahan Restra Biro Organisasi selaku koordinator evaluasi SAKIP pada komponen pelaporan kinerja menambahkan indikator kinerja pada level perangkat daerah.

2.5 Program Unggulan

Dalam mendukung Visi dan Misi Provinsi Lampung pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan Biro Organisasi termasuk dalam Misi ke-2 yaitu Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik dan

mengampu Janji Kerja Gubernur Terpilih yaitu Mereformasika Birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Yang bertujuan jangka menengah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi, Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja, Meningkatnya Kualitas Layanan Pada Masyarakat. Dalam rangka menunjang capaian Indikartor Kinerja Utama pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung melakukan beberapa kegiatan unggulan dan inovasi sebagai berikut:

Tabel 2.6. Program Unggulan dan Inovasi Tahun 2024

No	IKU 2024	Program Unggulan dan Inovasi
1.	Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana)	Sistem informasi manajemen jabatan (SI-MANJA) telah diintegrasikan dengan database kepegawaian BKD Provinsi Lampung secara realtime dari database tersebut yang bertujuan untuk mempermudah penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) di pemerintah Provinsi Lampung
2.	Nilai SAKIP pada komponen Pelaporan Kinerja	Melakukan pengembangan E-SAKIP berintegrasi dengan aplikasi E-Monev yang merupakan aplikasi monitoring kinerja oleh Bappeda Provinsi Lampung dan aplikasi EvaSAKIP yang merupakan aplikasi evaluasi kinerja internal oleh Inspektorat Provinsi Lampung
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Aplikasi SISMA SIGER yang membantu kegiatan pengukuran secara komperhensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan unsur-unsur pelayanan publik secara periodik

Sumber : Olahan Data Biro Organisasi, 2024

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang perlu dilakukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis, Rencana Kerja

Tahunan, dan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.

Dalam proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan instansi pemerintah dan visi misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja

pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerjanya dengan Pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kategori Capaian Indikator Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
2	Diatas 80% sampai dengan 90%	Memuaskan
3	Diatas 70% sampai dengan 80%	Sangat baik
4	Diatas 60% sampai dengan 70%	Baik
5	Diatas 50% sampai dengan 60%	Cukup
6	Kurang dari 50%	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Biro Organisasi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra 2019-2024 maupun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Gubernur Provinsi Lampung.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2023, hasil revidi dan Indikator Kinerja Utama Provinsi Lampung dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/770/B.09/HK/2019 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 000.8.6/5139-1/07/2024 Tahun 2024 Tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, telah ditetapkan 1 (satu) tujuan, 1 (satu) indikator tujuan, 1 (satu) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja (out comes).

3.2 Capaian Indikator Tujuan dan Kinerja Utama Tahun 2019-2024

Berikut ini adalah Capaian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung:



Tabel 3.2
Presentase dan penilaian realisasi kinerja tahun 2019-2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Sasaran	IKU Biro Organisasi	Satuan	Kinierja 2019		Kinerja 2020		Kinerja 2021		Kinerja 2022		Kinerja 2023		Kinerja 2024		Capaian
									T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
1.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, Kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran serta Ketatalaksanaan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Presentase Perangkat Daerah yang menginput LKE unit PMPRB Provinsi Lampung	100	100	100	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Pembentukan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi dan Ukuran Serta Tatalaksana Provinsi dan Kab/Kota	Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana)	%	70	70	75	75	80	80	85	85	90	90	100	100	100%
							Nilai SAKIP pada komponen Pelaporan Kinerja	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	11,34	103%
							Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	80	80,135	82	82	84	85,13	86	84,03	88	86,16	97%

Sumber : Data Olahan Biro Organisasi, Februari 2025

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Gubernur Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 Nomor: 000.8.6/5139-1/07/2024 tanggal 10 Oktober 2024, dan melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/770/B.09/HK/2019 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Biro Organisasi tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Renstra 2019-2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran serta tatalaksana provinsi dan kabupaten/kota	Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Tatalaksana)	%	100	100	100
		Nilai SAKIP pada komponen Pelaporan Kinerja	nilai	11	11,34	103
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor/nilai	88	86,15	97

Sumber :Olahan Data Biro Organisasi, Februari 2025

Biro Organisasi memiliki satu sasaran strategis yaitu Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran serta tatalaksana provinsi dan kabupaten/kota. Yang terdiri 3 (tiga) indikator sasaran, pada indikator sasaran pertama, Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Tatalaksana), realisasi pada tahun 2024 sebesar 100% dari target 100% sehingga persentase capaian sebesar 100% dengan kriteria sangat tinggi dan mencapai target. Pada indikator sasaran ke dua, Nilai SAKIP pada komponen pelaporan kinerja dengan realisasi pada tahun 2024 adalah 11,34 (nilai) dari target 11 (nilai) sehingga persentase capaian sebesar 103% dengan kriteria sangat tinggi dan mencapai target.

Pada indikator sasaran ke tiga, Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi pada tahun 2024 adalah 86,16 (skor/nilai) dari target 86 (skor/nilai) sehingga persentase capaian sebesar 102% dengan kriteria sangat tinggi dan mencapai target.

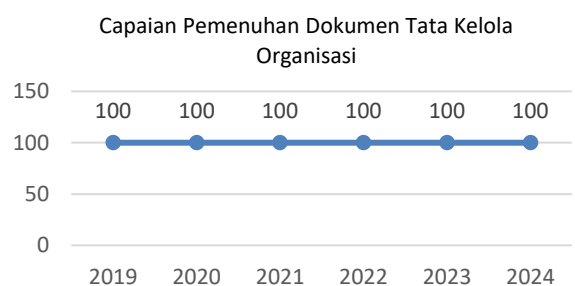
Dampak dari kinerja dengan kriteria yang sangat tinggi dari indikator sasaran 1 adalah berhasil diraihnya kenaikan indeks Reformasi Birokrasi dengan **predikat A** (Memuaskan) dengan **skor 82,68**. Prestasi tersebut merupakan wujud kinerja yang baik dari semua *stakeholders* yang terkait.

3.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 1

Capaian sasaran 1 Indikator Kinerja Utama 1 tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama 1 Tahun 2019-2024

Sasaran 1	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran serta tatalaksana provinsi dan kabupaten/kota																		
IKU 1	Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Tatalaksana)																		
Satuan	Persentase																		
Capaian Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Tatalaksana) Tahun 2019-2024																			
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Grafik Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Tatalaksana) The chart displays a constant achievement of 100% from 2019 to 2024. The y-axis ranges from 0 to 150, and the x-axis lists the years. A blue line with circular markers connects the data points, all of which are at the 100% level. <table border="1"><thead><tr><th>Tahun</th><th>Capaian (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2019</td><td>100</td></tr><tr><td>2020</td><td>100</td></tr><tr><td>2021</td><td>100</td></tr><tr><td>2022</td><td>100</td></tr><tr><td>2023</td><td>100</td></tr><tr><td>2024</td><td>100</td></tr></tbody></table>	Tahun	Capaian (%)	2019	100	2020	100	2021	100	2022	100	2023	100	2024	100
Tahun	Capaian (%)																		
2019	100																		
2020	100																		
2021	100																		
2022	100																		
2023	100																		
2024	100																		
1	2019	70	70	100															
2	2020	75	75	100															
3	2021	80	80	100															
4	2022	85	85	100															
5	2023	90	90	100															
6	2024	100	100	100															



Sumber : Olahan Data Biro Organisasi, 2024

Pada sasaran Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran serta tatalaksana provinsi dan kabupaten/kota dengan IKU I yaitu Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Tatalaksana)

Pada tahun 2019 dengan realisasi 70% dan capaian sebesar 100% maka dikategorikan Sangat Tinggi, tahun 2020 dengan realisasi 75% dan capaian sebesar 100% maka dikategorikan Sangat Tinggi, tahun 2021 dengan realisasi sebesar 80% dan capaian sebesar 100% maka dikategorikan Sangat Tinggi, tahun 2022 dengan realisasi sebesar 85% dan capaian sebesar 100% maka dikategorikan Sangat Tinggi, kemudian pada tahun 2023 dengan realisasi 90% dan capaian sebesar 100%. Pada akhir RPJMD yaitu pada tahun 2024 capaian IKU I dengan realisasi 100% dengan capaian 100%

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama 1 Tahun 2024 secara Nasional

Sasaran 1		
Sasaran 1	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran serta tatalaksana provinsi dan kabupaten/kota	
IKU 1	Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Tatalaksana)	
Satuan	Persentase	
2024		Nasional (Provinsi Sumatera Selatan)
Target	Capaian (%)	100
100	100	

Sumber : Biro Organisasi Prov. Lampung dan Biro Organisasi Provinsi Sumatera Selatan

Apabila dibandingkan dengan target capaian Indeks Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Tatalaksana) pada tahun 2024 dan skor Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi secara nasional (Provinsi

Sumatera Selatan) dengan persentase capaian target 100%. Hal tersebut menunjukkan capaian yang sama yaitu tingkat capaian sebesar 100%.

Dalam mencapai target kinerja, formulasi untuk mengukur Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah PD yang memenuhi dokumen tatakelola sesuai dengan peraturan yang berlaku}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Provinsi}} \times 100\%$$

Tabel 3.6 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi Indikator Kinerja Utama 1 Tahun 2024

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program Kegiatan yang telah dilaksanakan
1 Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam peningkatan kapasitas kinerja ; 2 Koordinasi hubungan kerja yang sinergis antar Bagian;	1 Kurangnya pemahaman dan kurang Kooperatifnya dari PD dalam menyediakan data yang diminta; 2 Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan PD yang kurang efektif, karena kurangnya pertemuan dan waktu yang selalu mendesak	1 Biro Organisasi harus melakukan peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan dokumen tata kelola organisasi 2 Biro Organisasi harus melakukan komunikasi yang efektif dan insentif dengan Pemerintah Pusat serta Kabupaten/Kota	1 Melakukan Desk/Bimbingan Teknis terkait penyusunan dokumen tata kelola organisasi 2 Melakukan sosialisasi regulasi terkait kelembagaan, Reformasi Birokrasi dan Ketata laksanaan; 3 Melakukan koordinasi yang intensif dengan Pusat maupun dengan Kabupaten/Kota dengan metode Hybrid (offline dan online)

Sumber : Olahan Data Biro Organisasi, 2024

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi yaitu menyiapkan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, Reformasi Birokrasi dan Tatalaksana, Biro Organisasi telah berupaya melakukan solusi-solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan serta mempertajam faktor-

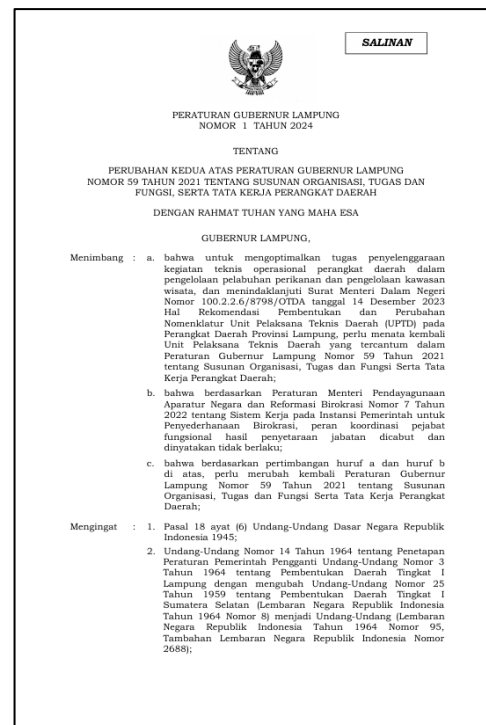
faktor pendukung agar kinerja yang dihasilkan menjadi baik dengan melakukan berbagai kegiatan yang mendukung capaian pada indikator sasaran ke 1 (satu). Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Organisasi pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan dan Analisis Jabatan adalah sebagai berikut:

a. Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah

Dalam optimalisasi Penyederhanaan Birokrasi pada pemerintah Provinsi Lampung dilakukan penyusunan Peraturan Gubernur Lampung nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Lampung nomor 59 tahun 2021 tentang Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah



b. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi

Dalam upaya pembinaan, pengawasan, penataan perangkat daerah agar tepat fungsi dan ukuran, Biro Organisasi telah melaksanakan beberapa kali perumusan/pembentukan SOTK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam

rangka pelaksanaan kegiatan penyederhanaan birokrasi dan penataan kelembagaan Biro Organisasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Fasilitasi Penataan kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Lampung



- Rapat Koordinasi supervisi tingkat kemajuan pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah di Kementerian Dalam Negeri



- Rapat Koordinasi Pembinaan dan Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota



c. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota

Dalam upaya pembinaan, pengawasan, penataan perangkat daerah agar tepat fungsi dan ukuran di Kabupaten/Kota, Biro Organisasi telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Rapat Pembentukan UPTD irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mesuji



- Rapat Pembentukan UPTD Rumah Potong dan UPTD Pusat Kesehatan Hewan Pada Dinas Peternakan Kota Bandar Lampung



- Sosialisasi Pembinaan dan Kematangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkot Metro



- d. Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi jabatan serta Analisis Beban Kerja, Biro Organisasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - Rapat Koordinasi penyusunan Anjab, ABK dan SKJ



- Rapat Penataan Tenaga Guru di Lingkungan Pemprov Lampung



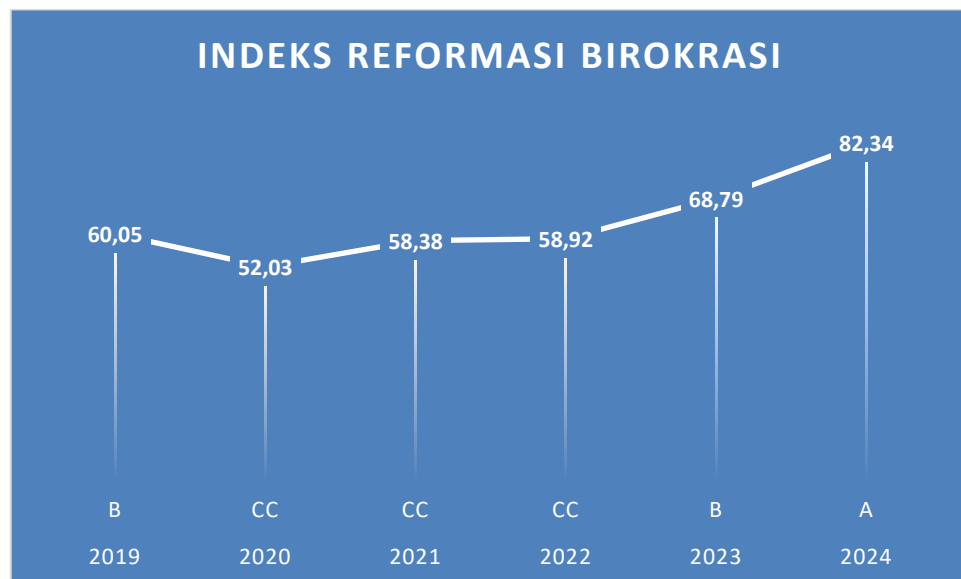
2. Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih berdampak terhadap capaian pembangunan serta menyentuh masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Lampung telah menyusun Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2024 yang merupakan penajaman indikator-indikator yang menjadi dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan kegiatan yang lebih fokus dan berdampak untuk

menyelesaikan permasalahan tata kelola pemerintahan atau isu-isu hulu (**RB General**) dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau isu-isu hilir (**RB Tematik**).

Indeks RB Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2019 sudah mencapai predikat Baik (B) namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi berpredikat CC (cukup). Indeks RB mengalami Tren positif atau selalu meningkat pada tahun-tahun berikutnya sehingga pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan kembali predikat baik (B) dan pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan peningkatan yang signifikan dengan mendapatkan **predikat A-** dengan nilai **82,34**

Gambar 3.1 Grafik Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2024



Sumber : Olahan Data Biro Organisasi, 2024

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Indeks RB pada RPJMD P 2019-2024

2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
B	B (60,05)	B	CC (52,03)	B	CC (58,38)	B	CC (58,92)	B	B (68,79)	BB	A- (82,34)

Sumber : Olahan Data Biro Organisasi, 2024

Dalam RPJMD Perubahan tahun 2019-2024, pada IKU Indeks Reformasi Birokrasi, target indeks Reformasi Birokrasi mengalami perubahan disesuaikan dengan realitas capaian. Pada data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah dapat memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2023 dan pada akhir RPJMD P target Indeks RB yang ditetapkan adalah berpredikat BB dengan skor minimal 70,01. Dengan demikian untuk mencapai target yang telah ditetapkan tentunya memerlukan kerja keras dan koordinasi yang baik dari masing-masing *stakeholders*.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi selaku koordinator dari implementasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Rapat Koordinasi tindak lanjut hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Lampung Tahun 2024



- Konsultasi percepatan Reformasi Birokrasi di KemenPAN RB RI



2. Implementasi Budaya Kerja

Dalam rangka percepatan implementasi Core Values BerAKHKAK dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung maka Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung telah menyusun Road Map ASN BerAhklak yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur No. G/316/B.07/2023 tgl 25 Mei 2023.

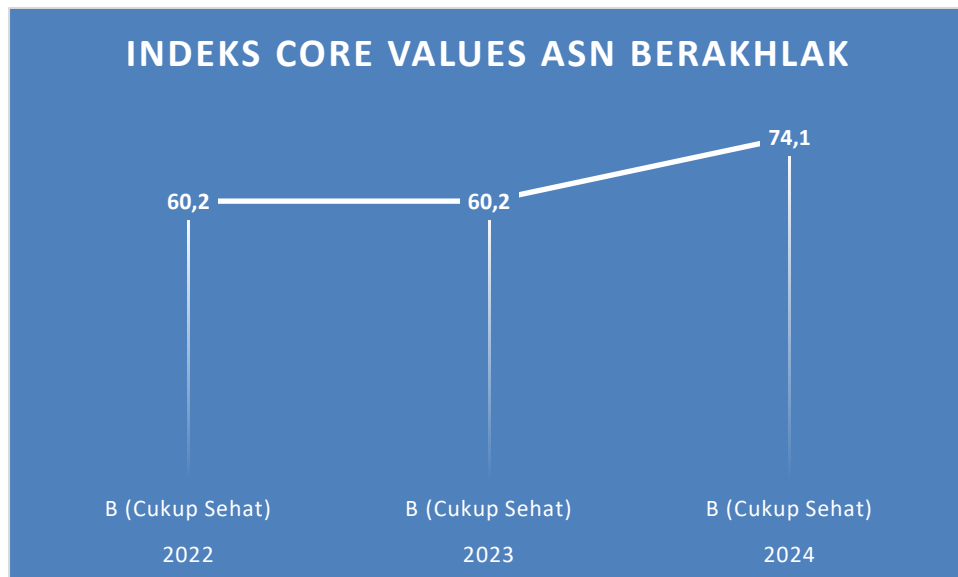
Berdasarkan hasil survei BerAKHLAK oleh Kementerian PAN RB pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan **kategori Cukup Sehat** dengan **predikat B** dan **skor 74,1%**. Capaian peningkatan implementasi Core Values BerAKHLAK pada Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2024 tersebut telah melebihi target yang ditetapkan yang tertuang dalam Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024. Capaian tersebut juga telah melebihi rata-rata nasional yaitu sebesar 68,1%. Namun demikian masih diperlukan kinerja yang optimal lagi mengingat Pemerintah Provinsi Lampung masih belum mendapatkan kategori Sehat dengan predikat A dan indeks minimal sebesar 75%

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Indeks Core Values ASN BerAKHLAK tahun 2022-2024

No.	Tahun	Target	Indeks	Capaian (%)	Predikat	Kategori
1	2022	-	60,2	100	Cukup Sehat	B
2	2023	62	60,2	97	Cukup Sehat	B
3	2024	65	74,1	114	Cukup Sehat	B

Sumber : Olahan Data Biro Organisasi, 2024

Gambar 3.2 Grafik Capaian Indeks ASN BerAKHKLAK Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022-2024



Sumber : Olahan Data Biro Organisasi, 2024

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi selaku koordinator dari implementasi Budaya Kerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Rapat Koordinasi penyusunan Rencana Aksi Implementasi BerAKHLAK dan penguatan implementasi BerAKHLAK tahun 2024



- Rapat Sosialisasi Survey Evaluasi Budaya Kerja ASN BerAHKLAK tahun 2024



3. Tatalaksana Pemerintahan

Isu utama bidang Tatalaksana Pemerintahan pada Biro Organisasi Setprov Lampung adalah Implementasi Sistem Kerja Baru. Pemerintah menerbitkan PermenPAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Menindaklanjuti PermenPAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyusun Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Provinsi Lampung. Pada tahun 2024 telah tersosialisasinya Sistem Kerja di Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Pelaksanaan Sistem Kerja pada Provinsi Lampung telah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat, hal ini dari diberikannya penghargaan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Implementasi Sistem Kerja Baru dengan **Kategori A** dan pada hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh KemenPAN RB

pada tahun 2024 **mendapatkan skor indeks 5 dengan kategori Sangat Baik.**

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi selaku koordinator dari Bidang Ketatalaksanaan Pemerintah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Bimbingan dan Sosialisasi Tata Naskah di Kabupaten Tulang Bawang



- Rapat Koordinasi Penyusunan Rapergub Pakaian Dinas



- Bimbingan Teknis tata Naskah pada Kantor Bahasa Provinsi Lampung



3.2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama 2

Pelaksanaan evaluasi SAKIP Pemerintah berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan regulasi tersebut terdapat 4 (empat) komponen dalam pengukuran evaluasi SAKIP yaitu; Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Berdasarkan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Indeks SAKIP Pemerintah Provinsi Lampung merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama.

Tabel 3.9 Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2019-2021 (PermenPAN RB No. 12/2015)

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai			Nilai/ Bobot x 100 % (2021)	PD Pengampu
			2019	2020	2021		
1	Perencanaan Kinerja	30	21,06	21,91	22,09	73,60%	Bappeda
2	Pengukuran Kinerja	25	14,6	15,23	15,3	61,20%	Bappeda
3	Pelaporan Kinerja	15	10,07	10,24	10,31	68,70%	Organisasi
4	Evaluasi Internal	10	6,12	6,19	6,19	61,90%	Inspektorat
5	Capaian Kinerja	20	11,94	12,47	12,99	64,90%	PD
Nilai Hasil Evaluasi		100	63,8	66,04	66,88		
Predikat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B		

Sumber : Olahan Data Biro Organisasi, 2024

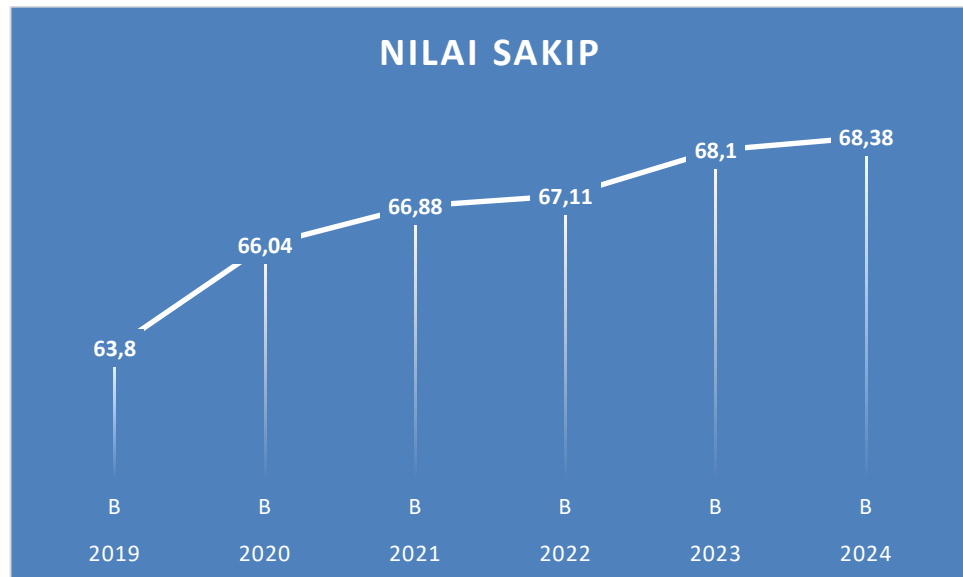
Tabel 3.10 Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022-2024 (PermenPAN RB No. 88/2021)

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai			Nilai/ Bobot x 100 % (2024)	PD Pengampu
			2022	2023	2024		
1	Perencanaan Kinerja	30	22,12	22,43	21,93	73,10%	Bappeda
2	Pengukuran Kinerja	30	18,6	19,04	18,44	61,46%	Bappeda
3	Pelaporan Kinerja	15	10,39	10,31	11,34	75,60%	Organisasi
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16	16,32	16,65	67%	Inspektorat
Nilai Hasil Evaluasi		100	67,11	68,1	68,36		
Predikat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B		

Sumber : Olahan Data Biro Organisasi, 2024

Dari data tabel-tabel dan gambar grafik dapat disampaikan bahwa nilai SAKIP Provinsi Lampung mengalami tren yang meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 meskipun belum mengalami perubahan predikat. Perubahan indikator pengukuran SAKIP dimulai pada evaluasi SAKIP tahun 2022 dimana terdapat 4 (empat) komponen yang diukur sementara sebelumnya terdapat 5 (lima) komponen yang diukur.

Gambar 3.3 Grafik Nilai SAKIP Tahun 2019-2024



Sumber : Olahan Data Biro Organisasi, 2024

Tabel 3.11 Target dan Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2019-2024

2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
B	B (63,80)	B	B (66,04)	B	B (66,88)	BB	B (67,11)	BB	B (68,10)	BB	B (68,36)

Sumber : Olahan Data Biro Organisasi, 2024

Dalam Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tahun 2019-2024 realisasi nilai SAKIP sudah terpenuhi namun untuk evaluasi SAKIP tahun 2024 nilai SAKIP masih belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu berpredikat BB, diperlukan upaya yang lebih keras dari stakeholders terkait.

Dalam rangka penyesuaian dan perwujudan penjenjangan kinerja yang lebih SMART dalam rangka pengukuran keberhasilan kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung melakukan perubahan indikator kinerja utama (IKU) dengan menambahkan Indikator Nilai SAKIP pada komponen pelaporan kinerja. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 000.8.6/5139-

1/07/2024 Tahun 2024 Tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Perubahan IKU tersebut sejalan dengan fungsi dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai koordinator pada komponen pelaporan SAKIP.

Tabel : 3.12 Capaian Indikator Kinerja Utama 2 Tahun 2024

Sasaran 1	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran serta tatalaksana provinsi dan kabupaten/kota			
IKU 2	Nilai SAKIP pada komponen pelaporan kinerja			
Satuan	Nilai			
Capaian Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Tatalaksana) Tahun 2019-2024				
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2024	11	11,34	103

Sumber : Olahan Data Biro Organisasi, 2024

Pada sasaran Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran serta tatalaksana provinsi dan kabupaten/kota dengan IKU 2 (dua) yaitu Nilai SAKIP pada komponen pelaporan kinerja, pada tahun 2024 dengan target nilai 11 dan capaian dengan nilai 11,34 dengan demikian capaian kinerja pada IKU 2 (dua) adalah sangat tinggi.

Tabel 3.13 Perbandingan Target Capaian Indikator Kinerja Utama 2 Tahun 2024 secara Nasional

Sasaran 1		
Sasaran 1	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran serta tatalaksana provinsi dan kabupaten/kota	
IKU 2	Nilai SAKIP pada komponen Pelaporan Kinerja	
Satuan	Nilai	
2024		Rata – Rata Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (Nasional)
Capaian Nilai SAKIP Provinsi Lampung pada komponen Pelaporan Kinerja		70,75 (BB)
Target	Capaian (%)	
11	11,34	
Capaian Nilai SAKIP Provinsi Lampung		
Target	Capaian(Nilai)	
70,01 (BB)	68,36 (B)	

Sumber : Olahan Data Biro Organisasi, 2024

Dibandingkan dengan data rata-rata nilai SAKIP Pemerintah Provinsi secara nasional maka nilai SAKIP Pemerintah Provinsi lampung masih berada dibawah angka nasional yang telah mencapai nilai 70,75 dengan predikat BB sedangkan Pemerintah Provinsi Lampung masih berada pada predikat B dengan nilai 68,36. Hal tersebut haris segera ditindaklanjuti dengan kinerja yang lebih optimal dari semua stakeholders terutama Inspektorat, bappeda dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Tabel 3.14 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi Indikator Kinerja Utama 2 Tahun 2024

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program Kegiatan yang telah dilaksanakan
1 Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dalam peningkatan Akuntabilitas Kinerja; 2 Telah terbangun aplikasi eSAKIP Provinsi Lampung dalam rangka mempermudah pengawasan kinerja	1 Kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam penyusunan dokumen Laporan Kinerja yang baik; 2 Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi antara Tim SAKIP Pemerintah Provinsi Lampung 3 Belum optimalnya aplikasi eSAKIP Provinsi Lampung	1 Biro Organisasi harus meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka penyusunan dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah; 2 Biro Organisasi harus melakukan komunikasi yang efektif dengan Tim SAKIP Pemerintah Provinsi Lampung 3 Biro Organisasi harus mengoptimalkan aplikasi eSAKIP Provinsi Lampung	1 Melakukan Desk/Bimbingan Teknis terkait penyusunan dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah; 2 Melakukan sosialisasi regulasi terkait akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah; 3 Melakukan koordinasi yang intensif antara Tim SAKIP Pemerintah Provinsi Lampung 4 Optimalisasi aplikasi eSAKIP Provinsi Lampung

Sumber : Olahan Data Biro Organisasi, 2024

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi yaitu menyiapkan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, Reformasi Birokrasi dan Tatalaksana, Biro Organisasi telah berupaya melakukan solusi-solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan serta mempertajam faktor-faktor pendukung agar kinerja yang dihasilkan menjadi baik dengan melakukan berbagai kegiatan yang mendukung capaian pada indikator sasaran ke 1 pada indikator kinerja utama ke 2

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi selaku koordinator dari implementasi SAKIP pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

- Rapat Koordinasi tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Provinsi Lampung Tahun 2024



- Asistensi/Desk Dokumen SAKIP Provinsi Lampung Tahun 2024



- Rapat Koordinasi Tim SAKIP dalam rangka persiapan Evaluasi SAKIP Provinsi Lampung Tahun 2024



- Rapat persiapan evaluasi SAKIP Tahun 2024



3.2.3 Capaian Sasaran I Indikator Kinerja Utama 3

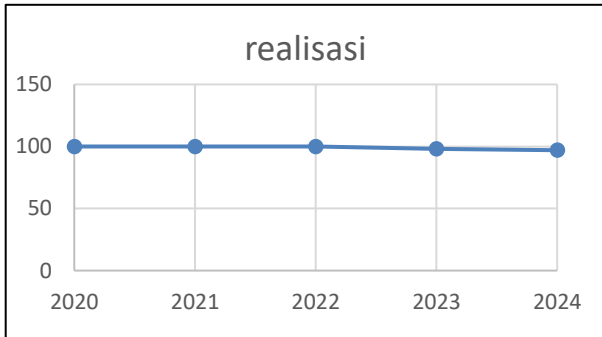
Dalam rangka mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik maka unsur-unsur yang merupakan indikator dari pelayanan publik dari Pemerintah Provinsi Lampung wajib ditingkatkan mengingat peningkatan pelayanan publik merupakan faktor utama dalam implementasi Reformasi Birokrasi. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan publik. IKM diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif. IKM adalah salah satu tolok ukur pelaksanaan pelayanan publik pada suatu pemerintahan, dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah.

Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Utama 3 Tahun 2020-2024

Sasaran 1	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran serta tatalaksana provinsi dan kabupaten/kota				
IKU 3	Indeks Kepuasan Masyarakat				
Satuan	Skor/Nilai				
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2023					
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat
1	2020	80	80,135	100	
2	2021	82	82	100	
3	2022	84	85,13	100	
4	2023	86	84,03	98	
5	2024	88	86,16	97	

realisasi



Tahun	Realisasi
2020	100
2021	100
2022	100
2023	98
2024	97

Sumber : Olahan Data Biro Organisasi, 2024

Pada sasaran Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran serta tatalaksana provinsi dan kabupaten/kota dengan IKU 3 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pada tahun 2020 dengan realisasi 80,135 (skor/nilai) dan capaian sebesar 100% maka dikategorikan Sangat Tinggi, tahun 2021 dengan realisasi sebesar 82 (skor/nilai) dan capaian sebesar 100% maka dikategorikan Sangat Tinggi, tahun 2022 dengan realisasi sebesar 84 (skor/nilai) dan capaian sebesar 100% maka dikategorikan Sangat Tinggi, tahun 2023 dengan realisasi sebesar 84,03 (skor/nilai) dan capaian sebesar

98% maka dikategorikan Sangat Tinggi dan pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 86,16 dengan realisasi 97% maka dikategorikan Sangat Tinggi

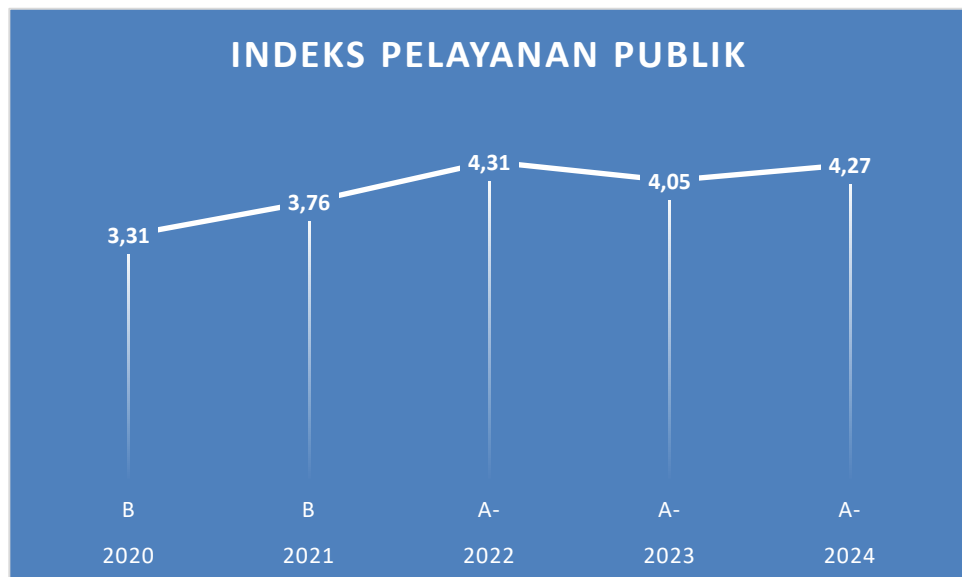
Tabel 3.16 Perbandingan Target Capaian Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama 2 Tahun 2024 Secara Nasional

Sasaran 1		
Sasaran 1	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran serta tatalaksana provinsi dan kabupaten/kota	
IKU ²	Indeks Kepuasan Masyarakat	
Satuan	Skor/Nilai	
2024		Nasional (Provinsi Sumatera Selatan)
Target	Capaian (%)	89,93
88	97	

Sumber : Biro Organisasi Prov. Lampung dan Dinas DPMTSPSP Prov. Sumatera Selatan

Apabila dibandingkan target capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Lampung dengan skor 86,16 pada tahun 2024 dan target capaian skor Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Provinsi terdekat yaitu Sumatera Selatan dengan capaian yang lebih tinggi yaitu 89,93, hal ini menunjukkan pelayanan publik di Sumatera Selatan lebih baik. Hal tersebut dapat menjadi pemantik agar Provinsi Lampung agar lebih baik lagi dalam memberikan Pelayanan Publik kepada masyarakat.

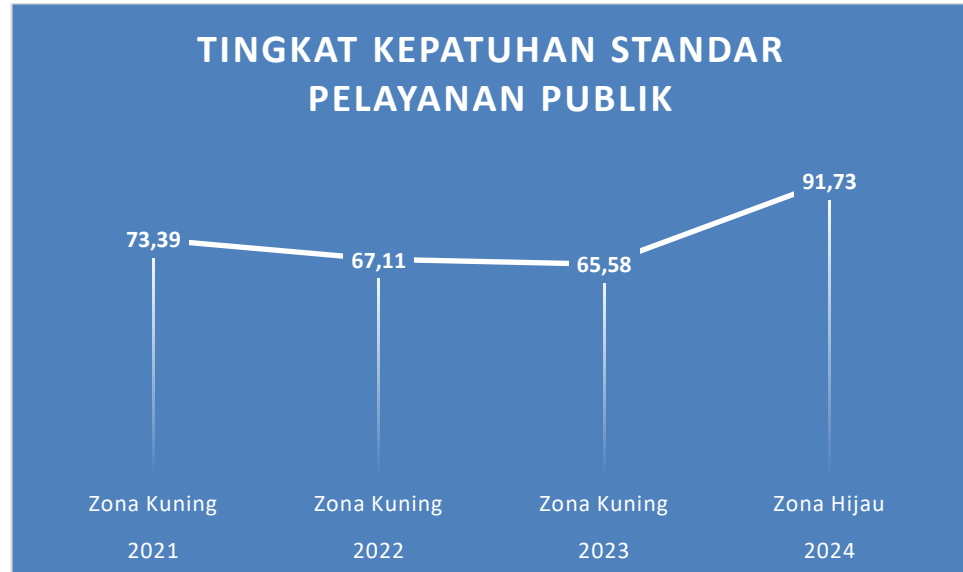
**Gambar 3.4. Grafik Indeks Pelayanan Publik
Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024**



Sumber : Olahan Data Biro Organisasi, 2024

Dari hasil penilaian evaluasi pelayanan publik tahun 2024 oleh Kementerian PANRB, Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik **4,27** dengan **kategori A-** atau **sangat baik**. Hasil ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya namun masih harus dilakukan pembenahan-pembenahan dan harus dilakukan intensifikasi dan pendampingan pada unit-unit pelayanan publik agar tidak mengalami penurunan. Namun pencapaian tersebut merupakan apresiasi dan merupakan prestasi tersendiri ditengah upaya pencapaian Misi-2 Gubernur Lampung yaitu Mewujudkan Good Governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.

Gambar 3.5 Grafik Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021-2024



Sumber : Biro Organisasi, 2024

Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik juga merupakan indikator pengukuran capaian kinerja pelayanan publik. Pengukuran dilakukan oleh Ombudsman RI. Pada tahun 2024 capaian nilai kepatuhan standar pelayanan publik Pemerintah Provinsi Lampung mengalami kenaikan signifikan dengan mendapatkan nilai **91,73** berada pada zona hijau dengan opini kualitas tertinggi. Hal tersebut merupakan kerja keras dari setiap stakeholders dan komitmen yang kuat dari pimpinan.

Dari dua tabel yang disajikan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan Misi Ke-2 yaitu Mewujudkan Good Governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik masih harus dilakukan peningkatan-peningkatan kinerja dan inovasi dari berbagai unsur-unsur stakeholders terkait. Pengukuran dari masing-masing indikator tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Indeks Kepuasan Masyarakat

dimana pengukuran kinerja pelayanan publik dikukur langsung dari dimensi pengguna layanan publik.

Dalam optimalisasi capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama 2 Biro Organisasi telah menetapkan Solusi dari faktor penghambat melalui berbagai Program dan Kegiatan pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.17 Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi Indikator Kinerja Utama 3 Tahun 2024

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program Kegiatan yang telah dilaksanakan
1 Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dalam peningkatan Pelayanan Publik; 2 Koordinasi yang baik antara koordinator dan unit pelayanan publik serta stakeholder pusat	1 Masih kurangnya regulasi daerah tentang pelayanan publik; 2 Digitalisasi pelayanan publik yang masih	1 Biro Organisasi dan Unit Pelayanan Publik harus meningkatkan regulasi pelayanan publik; 2 Biro Organisasi dan Unit Pelayanan Publik harus meningkatkan digitaliasi pelayanan publik	1 Menerbitkan surat edaran tentang peningkatan pelayanan publik 2 Peningkatan inovasi Pelayanan Publik yaitu aplikasi Sisma SIGER

Sumber : Olahan Data Biro Organisasi, 2024

Dalam rangka berupaya melakukan solusi-solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan serta mempertajam faktor-faktor pendukung agar kinerja yang dihasilkan menjadi baik dengan melakukan berbagai kegiatan yang mendukung capaian pada indikator kinerja utaman ke 3, Biro Organisasi melakukan Kegiatan-kegiatan pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Publik

- Rapat Koordinasi peningkatan pelayanan publik dengan Ombudsmen Provinsi Lampung



- Pendampingan dan Money PEKPP



- Audensi dengan Ombudsmen menyampaikan hasil penilaian mandiri 4 Perangkat Daerah (RSUAM, DPMPSTP, Dikbud dan Dinsos Provinsi Lampung)



- Sosialisasi Aplikasi SKM Elektronik (Sisma Siger) Provinsi Lampung



- Pendampingan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman Lampung



- Forum Konsultasi Publik Peningkatan Pelayanan Publik



3.4 Akuntabilitas Keuangan

Apabila dianalisa secara seksama dan keseluruhan program dan kegiatan bahwa dalam pengukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja pada masing-masing kegiatan, indikator dikelompokkan dalam Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil). Kelompok indikator masing-masing kegiatan tersebut berbeda sehubungan kemampuan untuk mendeteksi atau menghitung serta memahami kegiatan tersebut belum memadai.

Tabel 3.18 Pagu, Realisasi dan Capaian Anggaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	P-APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana)	1.746.226.500	1.450.202.763	83,06%
2.	Nilai SAKIP pada komponen Pelaporan Kinerja	121.346.000	120.945.800.	99,44%
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	132.427.500	126.882.570	95,81%

Sumber: Olahan Data Biro Organisasi, Februari 2025

Apabila dianalisa secara seksama dan keseluruhan program dan kegiatan bahwa dalam pengukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja pada

Tabel 3.19 Rincian Anggaran Biro Organisasi Tahun 2024

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Capaian Tahun 2024 (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.291.126.000,-	1.148.028.763,-	88.92
2.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Biro Organisasi dan Setda Provinsi Lampung Yang Tepat Waktu	136.638.100,-	94.958.000,-	69.49
3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi, dan Capaian Keuangan Biro Organisasi	54.565.100,-	37.738.500,-	69.16



		Yang Tepat Waktu			
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Yang Tepat Waktu	82.073.000,-	57.219.500,-	69.71
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Biro Organisasi Yang Sesuai Aturan	772.512.200,-	684.989.563,-	88.67
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	772.512.200,-	684.989.563,-	88.67
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Aturan	381.975.700,-	368.081.200,-	96.36
8.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216.601.400,-	211.906.300,-	97.83
9.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyedia Jasa Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	165.374.300,-	156.174.900,-	94.43
10.	Program Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) Yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku	708.874.000,-	550.002.370,-	77.59
11.	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan Yang Sesuai Aturan	209.666.500,-	145.078.000,-	69.19
12.	Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	96.709.000,-	58.061.400,-	60.03

13.	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota	38.364.000,-	30.993.900,-	80.78
14.	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	74.593.500,-	56.022.700,-	75.10
15.	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Fasilitasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Yang Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku	499.207.500,-	404.924.370,-	81.11
16.	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	102.476.000,-	72.655.300,-	70.89
17.	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	121.346.000,-	120.945.800,-	99.67
18.	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	78.580.000,-	60.542.000,-	77.04
19.	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tatalaksanaan Pemerintahan	64.378.000,-	23.898.700,-	37.12
20	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik	132.427.500,-	126.882.570,-	95.81

Sumber: Olahan Data Biro Organisasi, Februari 2025

Dari gambar diatas dapat dinyatakan bahwa pada APBD Murni Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Lampung mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga milyar rupiah). Dan pada APBD perubahan mengalami efisiensi menjadi Rp. 2.000.000,- atau sebesar 33%. Namun meskipun pagu anggaran mengalami efisiensi yang cukup tinggi tidak melemahkan kinerja dari Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Lampung, hal ini dapat terliha dari

gambar diatas bahwa capaian realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar **84,90%** dengan capaian kinerja sebesar **97,68%**. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan komitmen yang tinggi dari unsur pimpinan dan seluruh jajaran pada Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Lampung untuk lebih mengedepankan inovasi dan solusi yang tepat dalam mengelola manajemen resiko.

3.5 Efektifitas Kinerja dan Efisiensi Anggaran

Tabel 3.20 Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Tatalaksana)	Persen	100	97,26	97,26%	1.746.226.500	1.450.202.763	83,04%
2	Nilai SAKIP pada komponen pelaporan kinerja	Nilai	11	11,34	102%	121.346.000	120.945.800	99,44%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai/Skor	88	86,15	97%	132.427.500	126.882.570	95,81%
Jumlah Total						2.000.000.000	1.698.031.133	84,90%

Sumber: Olahan Data Biro Organisasi, Februari 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada ketiga Indikator Kinerja Utama pada Biro Organisasi pada tahun 2024 bahwa capaian kinerja lebih tinggi daripada capaian realisasi anggaran, hal tersebut mengindikasikan tercapainya efektifitas dan efisiensi anggaran pada Biro Organisasi.



Tabel 3.21

Persandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Tahun 2024 Dirinci menurut Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

No/ Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Tahun 2024					
			Kinerja			Anggaran		
1	2	3	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Pagu	Realisasi	%
40101	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	95,0%	94,98%	1.291.126.000,-	1.148.028.763,-	88.92
401011.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Biro Organisasi dan Setda Provinsi Lampung Yang Tepat Waktu	100%	90,91%	90,91%	136.638.100	94.958.000,-	69.49
401011.010001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi, dan Capaian Keuangan Biro Organisasi Yang Tepat Waktu	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	54.565.100	37.738.500,-	69.16
401011.010007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Yang Tepat Waktu	11 Dokumen	9 Dokumen	81,82%	82.073.000	57.219.500,-	69.71
401011.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Biro Organisasi Yang Sesuai Aturan	100%	100%	100%	772.512.200	684.989.563,-	88.67



401011.060009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100%	772.512.200	684.989.563,-	88.67
401011.060009	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Aturan	100%	94,02%	94,02%	381.975.700	368.081.200,-	96.36
401011.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92 Unit	81 Unit	88,04%	216.601.400	211.906.300,-	97.83
401011.080003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyedia Jasa Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	12 Bulan	12 Bulan	100%	165.374.300	156.174.900,-	94.43
40102	Program Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) Yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku	100%	100%	100%	708.874.000,-	550.002.370,-	77.59
401011.01	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Yang Sesuai Aturan	100%	100%	100%	209.666.500	145.078.000,-	69.19
401021.010001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	96.709.000	58.061.400,-	60.03
401021.010002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	38.364.000	30.993.900,-	80.78



401021.010003	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	20 Dokumen	20 Dokumen	100,00%	74.593.500	56.022.700,-	75.10
401021.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Fasilitasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Yang Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku	100%	100%	100,00%	499.207.500	404.924.370,-	81.11
401021.020001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	102.476.000	72.655.300,-	70.89
401021.020001	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	121.346.000	120.945.800,-	99.67
401021.020003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	78.580.000	60.542.000,-	77.04
401021.020004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tatalaksanaan Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	64.378.000	23.898.700,-	37.12
401021.020005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	132.427.500	126.882.570,-	95.81
Total/Rata-rata					97,68%	2.000.000.000,-	1.698.031.133,-	84.90

Sumber: Olahan Data Biro Organisasi, Februari 2025

Dari gambar dan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari kegiatan selama Tahun Anggaran 2023, Biro Organisasi melaksanakan 13 Sub Kegiatan dalam mendukung target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung Tahun 2024. Anggaran belanja pada Perubahan APBD sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan mengalami efisiensi pada APBDP menjadi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan total realisasi keuangan sebesar Rp.1.698.031.133,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) atau sebesar 84,90%

Untuk selanjutnya bahwa efektifitas dan efisiensi anggaran tertinggi terdapat pada sub kegiatan Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar 37,12% namun capaian kinerja sebesar 100% dan efektifitas dan efisiensi anggaran terendah terdapat pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 97,83% namun capaian kinerja sebesar 88,04%

3.6 Refokusing Anggaran

Refokusing anggaran yang terjadi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung merupakan upaya untuk memprioritaskan anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja yang lebih strategis, refokusing anggaran pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22. Refokusing Anggaran Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	APBD 2024 (Rp)	P-APBD 2024 (2024)	%
- Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Tatalaksana)	2.525.381.000,-	1.746.096.500,-	69,14
- Nilai SAKIP pada Komponen Pelaporan Kinerja	256.796.000,-	121.476.000,-	47,30
- Indeks Kepuasan Masyarakat	217.823.000,-	132.427.500,-	60,79

3.7 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Internal tahun 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 Satuan Kerja Biro Organisasi Nomor 700/145/IV.01/40/2025 tanggal 16 Juni 2025, didapatkan hasil evaluasi internal sebagai berikut:

Sehingga Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 secara keseluruhan mendapatkan nilai **81,3** dengan predikat **A** dan interpretasi **“Memuaskan”**.

Tabel 3.23 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			2023		2024
1	Perencanaan Kinerja	30	24,00	30	24
2	Pengukuran Kinerja	25	22,50	30	25,5
3	Pelaporan Kinerja	15	12,00	15	12,3
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	20,25	25	19,5
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	78,75	78,75	81,3
Predikat Akuntabilitas Kinerja			BB		A

Sumber : LHE Biro Organisasi 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi kinerja internal oleh Inspektorat Provinsi Lampung pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mengalami peningkatan di banding tahun anggaran sebelumnya (2023). Namun berdasarkan rekomendasi dan catatan dari Evaluator Internal masih banyak yang harus diperbaiki untuk peningkatan nilai dan predikat evaluasi akuntabilitas kinerja Internal.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Tindak Lanjut

Rekomendasi atas evaluasi SAKIP tahun 2024 700/145/IV.01/40/2025 tanggal 16 Juni 2025 dengan hasil tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 3.24 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024

No.	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
	Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja					
1	a. Agar Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung telah membuat SOP tentang pengumpulan data kinerja namun belum menyiapkan jadwal monitoring dan evaluasi kinerja sesuai rencana aksi tahun 2024	Sehubungan hasil rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan evaluasi terlampir kami kirimkan jadwal monitoring dan evaluasi kinerja sesuai (matriks rencana aksi Tw IV)	Tersusunnya jadwal monitoring dan evaluasi kinerja sesuai rencana aksi 2024.	Pelaksanaan 30 Juni 2025	Kepala Biro	Selesai Lampiran 1.a
2	b. Unit/satuan kerja belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dikarenakan indikator kinerja individu belum disajikan sehingga hasil atas pengukuran kinerja belum maksimal	Sehubungan hasil rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan evaluasi terlampir kami kirimkan indikator kinerja individu Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tahun 2024	Pimpinan Unit Kerja dan seluruh pegawai peduli atas hasil pengukuran kinerja	Pelaksanaan 30 Juni 2025	Kepala Biro	Selesai Lampiran 1.b
	Evaluasi Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal					
1	a. Agar Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mengusulkan Tim SAKIP pada perangkat Daerah mengikuti pelatihan/Bimtek terkait SAKIP	Sehubungan hasil rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan evaluasi terlampir kami kirimkan usulan mengikuti Bimtek/diklat terkait SAKIP ke BPSDM Provinsi Lampung	Pegawai mendapatkan pelatihan atau Bimtek terkait SAKIP	Pelaksanaan 30 Juni 2025	Kepala Biro	Selesai Lampiran 2.a

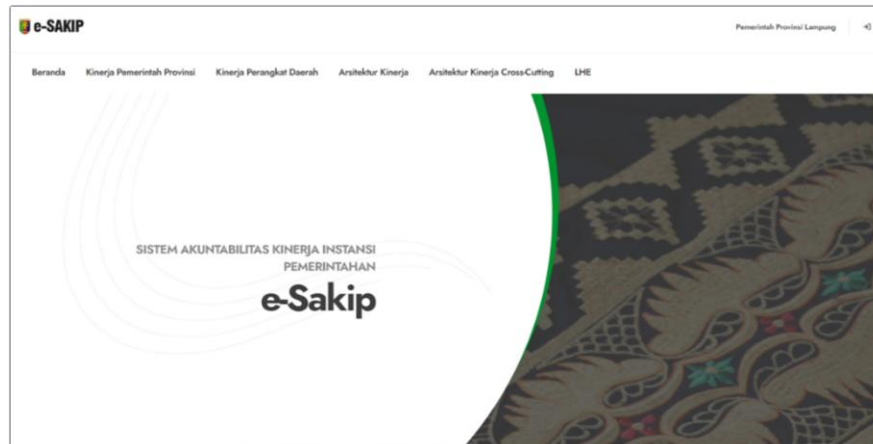
Sumber : TL LHE Biro Organisasi, Februari 2025

3.8 Inovasi dan Prestasi

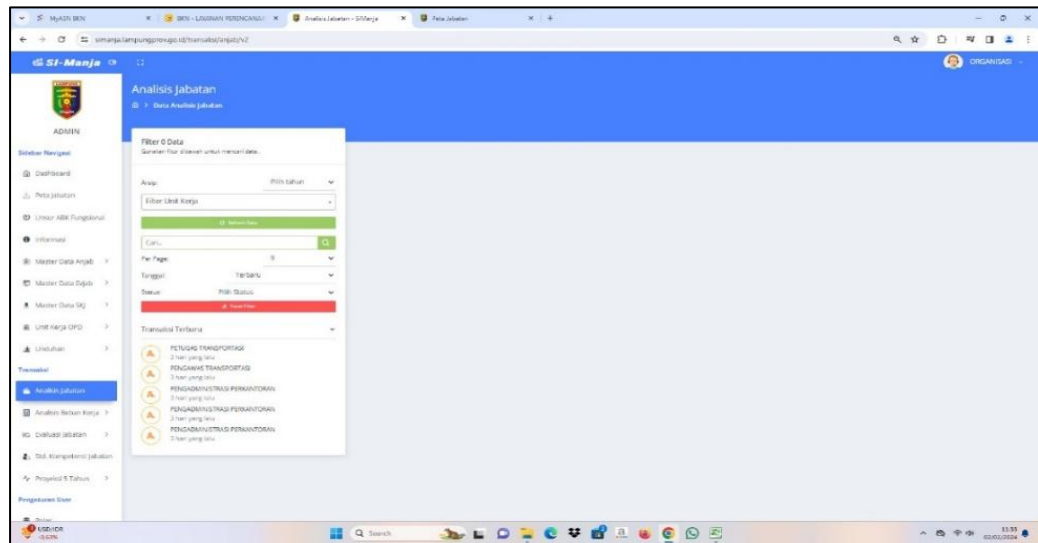
3.8.1 Inovasi

a. e-SAKIP Provinsi Lampung

eSAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara Elektronik) adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah secara elektronik. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah, memastikan bahwa setiap instansi dapat melaporkan hasil kinerja mereka secara sistematis dan terukur. eSAKIP Pemerintah Provinsi Lampung mulai dibangun pada tahun 2021, melalui Biro Organisasi berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung. Dalam perkembangannya terutama pada tahun 2023, eSAKIP Pemerintah Provinsi Lampung mengalami kendala sehingga diperlukan terobosan sehingga eSAKIP sebagai aplikasi SAKIP yang terintegrasi dapat diwujudkan. Pada tahun 2024 aplikasi eSAKIP semakin dikembangkan dengan integrasi dengan aplikasi SiMonev yang merupakan aplikasi monitoring kinerja yang diinisiasi oleh Bappeda Provinsi Lampung dan juga aplikasi EvaSAKIP yang merupakan aplikasi evaluasi kinerja internal yang diinisiasi oleh Inspektorat Provinsi Lampung.

Gambar 3.6 Aplikasi eSAKIP Provinsi Lampung**b. Si-Manja Provinsi Lampung**

Sistem Informasi Manajemen Jabatan (SI-MANJA) adalah sebuah sistem informasi yang dirancang untuk mengelola informasi jabatan diantaranya Analisis Jabatan Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (Evjab) dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) pada Organisasi Pemerintahan Provinsi Lampung. System Informasi Manajemen Jabatan ini telah diintegrasikan dengan Database Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, dimana Data Pegawai serta Data Unit Kerja diambil secara realtime dari database tersebut. Tujuan aplikasi ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan di Pemerintah Provinsi Lampung.

Gambar 3.7 Aplikasi Si-Manja Provinsi Lampung

c. Sisma SIGER Provinsi Lampung

Sisma Siger (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat Lampung) Provinsi Lampung merupakan aplikasi yang diinisiasi oleh Biro Organisasi pada tahun 2024. Aplikasi Sisma SIGER merupakan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang membantu kegiatan pengukuran secara komperhensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan unsur-unsur pelayanan publik secara periodik. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Fungsi dari Sisma SIGER Provinsi Lampung adalah:

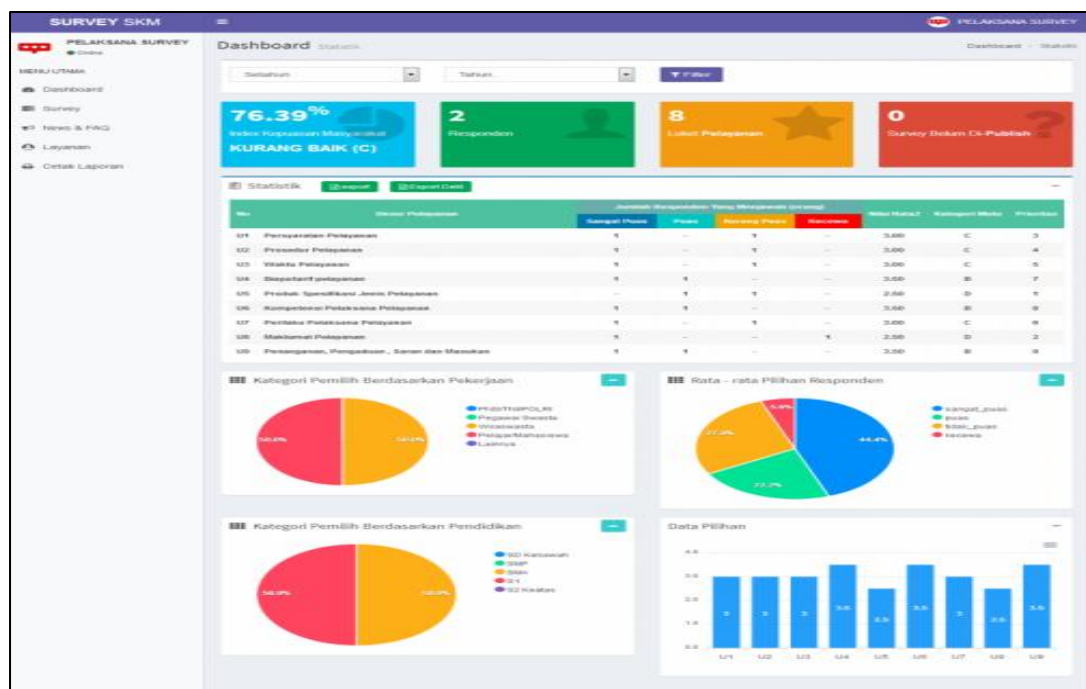
1. Mendorong partisipasi masyarakat Provinsi Lampung sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan,
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Lampung,

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Lampung,
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Lampung.

Aplikasi Sisma SIGER mengimplementasikan prinsip-prinsip pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yaitu:

1. Transparan
2. Partisipatif
3. Akuntabel
4. Berkesinambungan
5. Keadilan
6. dan Netralitas

Gambar 3.8 Aplikasi Sisma SIGER Provinsi Lampung





No	Inovasi	Uraian	Manfaat	Dampak
1.	e-SAKIP	e-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara Elektronik) adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah secara elektronik.	- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung - Memudahkan proses kinerja Perangkat Daerah - Mendukung tata Kelola pemerintahan yang baik - Mempermudah pengukuran kinerja - Integrasi dan sinkronisasi data SAKIP	Meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung melalui pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi secara elektronik
2.	SI-MANJA	Sistem informasi yang dirancang untuk mengelola informasi jabatan diantaranya Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (Evjab) dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) pada Biro Organisasi Pemerintahan Provinsi Lampung.	- Meningkatkan efisiensi/mempercepat proses penyusunan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (Evjab) dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), - Meningkatkan akurasi/mengurangi kesalahan dan meningkatkan ketepatan data informasi kepegawaian, - Meningkatkan kualitas kerja dan	Tersedianya layanan informasi Manajemen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (Evjab) dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung melalui sistem yang berbasis

			hasil, menghemat biaya operasional dan administrasi, - meningkatkan keamanan dan perlindungan data informasi dari pihak yang tidak berkepentingan serta meningkatkan kolaborasi dalam kerjasama antar perangkat daerah;	elektronik.
3.	SISMA SIGER	Penerapan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pemerintah Provinsi Lampung dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Lampung menggunakan platform SISMA SIGER untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh berbagai perangkat daerah.	- Meningkatkan kualitas pelayanan publik - Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah - Membantu pemerintah dalam membuat kebijakan yang tepat sasaran	- Meningkatkan kualitas pelayanan publik - Mengetahui kelemahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan - Memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat secara terpadu

Sumber: Olahan Data Biro Organisasi, Februari 2025

3.8.2 Prestasi

- a. Melalui Biro Organisasi, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung memperoleh peningkatan yang signifikan pada tahun 2024, yaitu memperoleh nilai 82,34 dengan predikat A- dibandingkan tahun 2023 yaitu memperoleh nilai 68,79 dengan predikat B.
- b. Melalui Biro Organisasi, Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Lampung memperoleh peningkatan yang signifikan pada tahun 2024, yaitu memperoleh nilai 91,73 dengan predikat A (Zona Hijau) dibandingkan tahun 2023 yaitu memperoleh nilai 65,58 dengan predikat B (Zona Kuning)
- c. Melalui Biro Organisasi, Implementasi Sistem Kerja Pemerintah Provinsi Lampung memperoleh nilai 5 dengan kategori sangat memuaskan pada 2024. Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan berupa kategori A
- d. Melalui Biro Organisasi, Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2024 memperoleh nilai 4,27 dengan kategori A- (Sangat Baik)
- e. Nilai SAKIP Biro Organisasi pada tahun 2024 mendapatkan predikat A dengan skor 81,3 “MEMUASKAN”
- f. Indeks Kearsipan Biro Organisasi pada tahun 2024 mendapatkan nilai 95,99 dengan kategori AA “SANGAT MEMUASKAN”
- g. Indeks Sistem Merit Biro Organisasi pada tahun 2024 mendapatkan nilai 298,5 dengan kategori III “BAIK”

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian keterangan capaian keuangan maupun capaian kinerja yang dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Capaian pada Indikator 1 mempunyai capaian kinerja rata-rata sebesar 97,26% dengan persentase realisasi keuangan sebesar 83,04%;
- b. Capaian pada Indikator 2 mempunyai capaian kinerja rata-rata sebesar 100% dengan persentase realisasi keuangan sebesar 99,44%;
- c. Capaian pada Indikator 3 mempunyai capaian kinerja rata-rata sebesar 100% dengan persentase realisasi keuangan sebesar 95,81%.

4.2 Rekomendasi

Dalam meningkatkan kinerja pada Biro Organisasi untuk menjalankan Visi dan Misi Gubernur Lampung diperlukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- a. Mengupayakan kegiatan-kegiatan yang bersifat inovatif pada masing-masing program/kegiatan sebagai solusi efisiensi anggaran sehingga mampu mendorong kinerja yang menjadi pendukung



Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi Sekretariat Daerah dan Provinsi Lampung;

- b. Optimalisasi Tim Kerja dalam rangka capaian Indikator Kinerja Utama;
- c. Melakukan evaluasi berkala terhadap progress kinerja pada masing-masing Tim Kerja;
- d. Optimalisasi koordinasi dan komunikasi dengan berbagai stakeholder dalam rangka pencapaian tujuan bersama yang telah ditetapkan